



## Hasil Survei Hidup Layak di Kota Rp 4,4 Juta

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* -  
Jelang akhir tahun 2025, pekerja  
di Kota Yogyakarta menggelar  
survei kebutuhan hidup layak  
(KHL). Hasilnya diketahui  
biaya hidup di Kota Yogyakarta  
mencapai Rp 4,4 juta.

Nilai itu jauh di atas upah  
minimum kota (UMK). Saat  
ini UMK mencapai Rp 2,6  
juta. Hampir dua kali lipat.  
Selisih Rp 1,8 juta.

Atas selisih tinggi itu,  
Konfederasi Serikat Pekerja  
Seluruh Indonesia (KSPSI)  
menuntut kenaikan UMK  
2026 sesuai biaya hidup.  
"KHL kami menunjukkan  
kenaikan signifikan. Ini angka  
riil di lapangan yang harus  
dipenuhi pekerja agar bisa  
hidup layak," kata Sekretaris  
DPC KSPSI Kota Yogyakarta  
Dinta Yuliant Sukma, Jumat  
(21/11/2025).



DOK ISTMENAWAJOGLO JOGJA

**Pipin Ani Sulistiati**  
Kabid Kesejahteraan  
dan Hubungan Industrial  
Disnakertrans Kota  
Yogyakarta

Ia menjelaskan, UMK Kota  
Yogyakarta saat ini belum  
mampu mengimbangi kenaikan  
harga kebutuhan pokok.  
Otomatis kalangan pekerja  
harus kreatif untuk memenuhi  
kebutuhan sehari-hari.

■ Baca **HASIL...** Hal II

# Hasil Survei Hidup Layak di Kota Rp 4,4 Juta

sambungan dari hal Jogja Jogja

Mulai dengan mencari sampingan. Sampai menambah lembur.

"Kami mendesak agar ada kenaikan sesuai KHL ini," tegasnya.

Sampai saat ini, pembahasan UMK 2026 di Kota Yogyakarta belum dimulai. Kementerian Ketenagakerjaan pun belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) perhitungan UMK.

"Variabel perhitungan yang berbeda, sebagaimana

terjadi dalam penetapan UMK tahun lalu," jelasnya.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, saat ini Pemkot Yogyakarta juga tengah melakukan survei kebutuhan harian. Ini sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan pengupahan tahun depan.

"UMR akan naik kalau konsumsi naik. Ada indeksnya. Kami hitung dari perkembangan

harga pangan dan nonpangan serta kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas, Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Pipin Ani Sulistiati memastikan, hingga saat ini belum ada kepastian jadwal pembahasan UMK.

"Semua masih menunggu arahan pusat. Pembahasan UMK DIY juga belum dimulai, kemungkinan jadwalnya mundur," katanya.

Semula UMP DIY dijadwalkan diumumkan 21 November 2025. Tapi, sampai saat ini besaran UMP DIY belum ditetapkan sehingga pembahasan UMK kabupaten/kota di DIY pun belum dapat dilaksanakan. (eri/and/wa).

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005